

ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN SE-SUMATERA BARAT

ARTIKEL

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH:

ALISHA RAHMADHANI ISNI

14043101/2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

ANALISIS KUALITAS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN SE-SUMATERA BARAT

Oleh:

ALISHA RAHMADHANI ISNI

14043101

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
September 2018 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Agustus 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Pembimbing II



Ervy Mulvan, SE, M.Si
NIP. 19781204 200801 2 001

ANALISIS KUALITAS *website* PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN SE-SUMATERA BARAT

Alisha Rahmadhani Isni
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: alishaisni@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas website Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Sumatera Barat serta penyediaan layanan website yang bersifat transparansi, akuntabilitas, efektif, dan efisien. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif-deskriptif. Dokumentasi dan kepustakaan digunakan untuk proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik analisis skoring. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kualitas website sesuai dengan peraturan Kominfo dan prinsip *good governance* pada Kabupaten di Sumatera Barat masih rendah (2) Faktor penyebab rendahnya kualitas website yaitu penyediaan informasi yang minim, tidak update, dan kurangnya evaluasi yang dilakukan pemerintah (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan pelatihan kepada staff khusus bidang informatika, memberikan evaluasi rutin dalam pengembangan website, dan menerapkan sanksi terhadap website yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kata kunci: *e-government, good governance, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi.*

This study aims to determine how the quality of local government websites in the district of West Sumatra Province assessing its transparency, accountability, effectivity, and efficiency. This research used quantitative-descriptive method. Documentation and bibliography are used for the data collection process using scoring analysis techniques. The results showed: (1) The quality of the website in accordance with Kominfo regulations and the principles of good governance in the District in West Sumatra is still low (2) The factor causing the low quality of the website are the lack of information, no updates, and the lack of evaluation by the government (3) Efforts to overcome these barriers are conducting training for staffs, providing routine evaluations in website development, and imposing sanctions on websites that do not conform with standards.

Keywords : *e-government, good governance, tranparation, accountability, effectivity, efficiency*

PENDAHULUAN

Kemudahan dalam memperoleh informasi publik merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan semakin canggih, pemerintah dengan menggunakan teknologi tersebut dapat memanfaatkannya dalam memberikan akses informasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam memberikan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, maka pemerintah daerah harus menyediakan informasi tentang seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, sehingga informasi tersebut dapat dipantau dan mempermudah masyarakat maupun pihak lain untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan teknologi internet mendorong pemerintah untuk menerapkan suatu sistem berbasis teknologi yaitu *electronic government (e-government)*. *e-government* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan penyediaan layanan publik yang lebih baik (Heryana, 2013).

Di Indonesia penerapan *e-government* ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Perkembangan *e-government* merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upaya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Pemerintah harus segera melaksanakan *e-government* agar dapat terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah. Keluarnya Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang penyediaan menu TPA (transparansi pengelolaan anggaran), yang mewajibkan pemerintah daerah (kabupaten maupun kotamadya) untuk mempublikasikan 12 dokumen terkait pengelolaan anggaran pada website resmi pemerintah daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong *e-government* tersebut (Agustin, 2014).

Implementasi dari penerapan *e-government* adalah tersedianya *website* pemerintah daerah yang berkualitas. *website* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang biasanya

terangkum dalam sebuah domain atau subdomain. Tujuan pembuatan situs *website* pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak lain dalam memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah sehingga pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dapat diserap dalam volume yang besar secara cepat dan akurat oleh masyarakat

Dalam menilai *website* yang berkualitas, berdasarkan prinsip dari *good governance* menyatakan *website* yang berkualitas apabila *website* tersebut menjalankan prinsip dari *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan efektif serta efisien. Sedangkan menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika suatu *website* dikatakan berkualitas apabila *website* tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu tersedianya konten selayang pandang, pemerintahan daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, peraturan atau kebijakan daerah, serta buku tamu dan berita. Dengan diterapkan unsur tersebut pada setiap *web* pemda, maka *website* pemerintah daerah akan berkualitas tinggi, inklusif, serta menampilkan citra yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah (Khudri, 2013).

Dalam menjalankan *website* yang berkualitas sesuai dengan *good governance*, maka *website* pemerintah harus di sampaikan secara transparansi dan akuntabilitas. Suatu *website* dikatakan transparansi yaitu apabila *website* tersebut menampilkan secara terbuka semua informasi mengenai hal yang menjadi perhatian publik dan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan sehingga masyarakat memahami saja permasalahan yang terdapat pada pemerintah. Tuntunan dari akuntabilitas publik adalah bukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan tetapi juga membuat laporan yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah yang dicantumkan pada *website* pemda. Penerapan *good governance* pada setiap *website* pemda bertujuan agar terjaminnya kualitas *website* yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga adanya akurasi informasi dan terciptanya pelayanan publik yang lebih memadai karena kemudahan akses komunikasi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya pemerintah Kabupaten, penerapan *e-government* adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah prioritas dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Barat untuk agenda membangun pemerintah yang baik (*good governance*). Dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, diwujudkan dengan meningkatkan sistem informasi dan komunikasi pembangunan daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Agar agenda tersebut tercapai, salah satu cara dilakukan diantaranya adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik melalui *website* pemerintah daerah (Yoserizal, 2010).

Dalam praktiknya, penerapan *e-government* dalam mewujudkan terciptanya *good governance* belum dikatakan maksimal. Penerapan *e-government* pada institusi pemerintahan tidak maksimal karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika. Hal ini disebabkan adanya moratorium aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian PAN-RB, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang teknik informatika, anggaran yang kurang memadai, tidak adanya standarisasi infrastruktur, serta minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government* sehingga ini menjadi kendala dalam penerapan *e-government* yang efektif dan efisien. Hal ini mengakibatkan pola birokrasi lama masih berjalan sehingga terjadi kesenjangan pemanfaatan teknologi (kompas.com, 2016).

Untuk konteks Sumatera Barat sendiri, pemanfaatan *website* resmi pemda untuk mengoptimalkan layanan public, pemberian informasi, maupun publikasi dokumen penggunaan anggaran masih belum optimal. *Website* pemerintah kabupaten maupun kotamadya di Propinsi Sumatera Barat cenderung tidak terkelola dengan baik. Informasi yang disediakan pada *website*, baik yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran maupun profil daerah saat ini kebanyakan tidak *update*, masih minim dengan informasi layanan publik, banyak ditemukan halaman kosong. Selain itu masih ada beberapa kabupaten yang belum memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kominfo dan prinsip *good governance*

Hal tersebut tentunya kenyataan yang cukup memprihatinkan bagi kita semua, mengingat untuk pengembangan masing masing *website* Kabupaten maupun kotamadya di Sumatera Barat tersebut, biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah cukup besar. Berikut biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam pengembangan *e-government*.

Tabel 1
Anggaran Pengembangan Informasi, Komunikasi, Media Masa, dan e-government Menurut APBD Kab/Kota Se- Sumbar

Nama Kabupaten	Anggaran Dana
Pasaman	Rp 1.647.803.400
Dharmasraya	Rp 1.495.404.500
Agam	Rp 1.837.319.600
Tanah Datar	Rp 1.198.836.000
Sijunjung	Rp 532.387.355
Solok Selatan	Rp 1.260.099.400
Kepulauan Mentawai	Rp 3.444.943.000
Pesisir Selatan	Rp 4.001.355.293
Lima Puluh Kota	Rp 1.380.426.000
Solok	Tidak Ditampilkan
Padang Pariaman	Rp. 358.300.000
Pasaman Barat	Rp. 253.105.000

Jika dilihat pada tabel 1, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak sebanding dengan kualitas *website* yang disajikan.

Penelitian sebelumnya (Dwi Martani, dkk 2013) melihat bagaimana kualitas *website* yang diukur dari penilaian transparansi dan akuntabilitas saja. Maka dengan mempertimbangkan penelitian sebelumnya, terkait dengan *website* yang dimiliki pemda, penelitian ini tidak hanya menilai dari segi transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menilai dari segi fitur *website*, keefektifan *website* dan keefesiensian *website*. Selain itu penelitian ini akan menilai *website* pemda di mata pengguna serta membandingkannya dengan *website* pemda Kota Surabaya yang merupakan salah satu *website* pemda terbaik di Indonesia.

Berdasarkan hal diatas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat dengan menggunakan prinsip *good governance* baik dari kualitas konten maupun dari segi pengguna. Oleh karena itu, maka peneliti mengangkat penelitian mengenai “**Analisis Kualitas *website* Pemerintah Daerah pada Kabupaten se- Sumatera Barat**”.

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Bagaimana kualitas *website* pemerintah daerah dari segi penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi yang ada pada seluruh Kab/Kota Sumatera Barat ?

KAJIAN TEORI

Landasan Teori

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik yang dimaksud dengan *principals* adalah rakyat dan *agent* adalah pemerintah. Menurut (Hilmi dan Dwi Martani, 2012) sebagai *principal* masyarakat memberikan amanat kepada pemerintah selaku *agent* untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Istiqomah, 2014)

Pada pemerintah daerah, implikasi dari teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku prinsipal yang mana telah memberikan amanat kepada pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pemerintahan yang telah dan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan masyarakat adalah dalam bentuk penyediaan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel pada *website* sehingga keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar bisa berjalan secara efektif dan efisien.

2. Teori Signaling

Teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah selaku pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat (Ikhlis Wau 2015). Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan pencapaian-pencapaian pemerintah. Connelly dkk (2011) mengatakan bahwa teori sinyal (*signaling theory*) pada dasarnya berguna untuk mengurangi asimetri informasi antara dua pihak. Asimetri informasi merupakan adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki oleh

pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan teori sinyal (*signaling theory*) pemerintah sebagai penerima mandat/amanah dari masyarakat akan berusaha untuk memberikan sinyal yang baik agar masyarakat bisa terus mendukung kerja pemerintah.

Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan pemerintah untuk memberikan informasi adalah karena adanya asimetri informasi antara pemda dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Salah satu cara dalam mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat. Selain memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pelayanan publik pada *website* yang berkualitas, pemerintah dapat mengurangi asimetri informasi dengan cara peningkatan sistem pengendalian internal dan menampilkan seluruh pengungkapan berupa informasi keuangan dan non keuangan yang positif dan dapat dipercaya pada *website*.

3. Kuaalitas *website*

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur dalam pelayanan e-goverment melalui *website*, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah satu pelayanan (e-goverment) yang diberikan dapat di katakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Penilaian kualitas *website* di dasarkan pada dua teori. Pertama menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika yaitu terdiri dari penilaian fitur selayang pandang, pemerintah daerah, geografi, peta wilayah dan sumber daya, peraturan/kebijakan daerah dan buku tamu/berita. Kedua menurut Inpres No 3 Tahun 2003 yaitu *website* berkualitas apabila sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas dan Efisiensi.

A. Penilaian Fitur

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2007 suatu *website* yang berkualitas apabila menyediakan konten yang telah ditetapkan yaitu

- 1.Selayang Pandang, menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, moto Daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
- 2.Pemerintah Daerah, menjelaskan struktur organisasi yang ada di Daerah bersangkutan.
- 3.Geografi, menjelaskan antara lain tentang, topografi, demografi, cuaca, dan iklim, sosial, dan ekonomi.
- 4.Peta wilayah dan sumber daya, menyajikan batas administrasi wilayah, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh Daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumber daya.

5. Peraturan atau kebijakan Daerah, menjelaskan Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.

6. Buku tamu dan berita, tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web Pemerintah Daerah bersangkutan.

B. Penilaian Transparansi

Beberapa kriteria untuk membangun *website* yang transparansi menurut Dwi Martani 2013

- a. Informasi mengenai kebijakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
- b. Informasi mengenai kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Informasi mengenai kinerja Pemerintah Daerah.

C. Penilaian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu pertanggungjawaban yang merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan sebagai bagian dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). (Stanbury, 2003 dalam Auditya, 2013) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebagai suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Kriteria Akuntabilitas menurut Krina (2003) dan BPKP :

- a. Website menyajikan laporan pendapatan belanja daerah.
- b. *website* menyajikan laporan dana hibah dan bansos.
- c. Penyajian laporan keuangan tepat waktu.
- d. Adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yang ditampilkan pada *website* .

C. Penilaian Efektivitas

Menurut (Amin Tunggal Widjaya, 1992 dalam Muttaqin, 2013) efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Menurut (Sondang, 2005 dalam Muttaqin, 2013) memberikan definisi efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Kriteria penilaian efektifitas suatu *website* menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 :

a. Interactifity

Interactifity yaitu adanya proses interaksi dua arah antara Pemerintah pengelola *website* dan masyarakat pengakses tersebut. Seperti pemerintah menyediakan fasilitas berupa, email, layanan telepon, alamat, dan pengaduan masyarakat.

b. Sistem Navigasi

Merupakan petunjuk bagi pengunjung *website* berupa, fitur pencarian dan link akun resmi media sosial Pemda.

D. Penilaian Efisiensi

Menurut Sata Aswei Putra (2013) efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi menunjukkan bagaimana mencapainya, yakni dibanding dengan usaha, biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan. Adanya efisiensi diharapkan para pemerintah daerah dalam menjalankan *e-government* yaitu penggunaan *website* yang tepat sesuai yang dibutuhkan.

Menurut Sata Aswei Putra (2013) suatu *website* dikatakan efisiensi apabila *website* tersebut memiliki beberapa indikator:

1. *website* tidak memiliki halaman kosong

Dalam mengakses informasi yang ada pada *website*, informasi yang disajikan bisa diakses dan tidak hanya berupa halaman kosong.

2. Informasi penting terdapat langsung pada halaman utama.

Pada saat membuka website, informasi penting yaitu berita terbaru langsung ditampilkan pada halaman utama pada saat pertama kali akses.

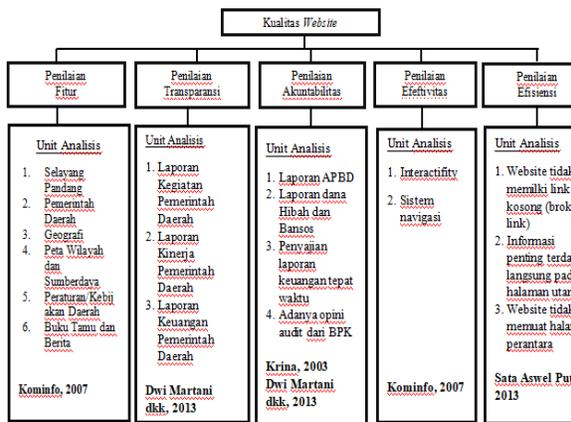
3. *website* tidak memiliki halaman perantara.

website tidak memiliki halaman penghubung untuk masuk kedalam halaman beranda awal.

Dari unsur-unsur di atas apabila Pemerintah dapat melakukan dan mewujudkan ke dalam sistem Pemerintahan *e-government* melalui situs *website*, maka terciptanya pelayanan *website* yang prima akan sangat mungkin terjadi di Provinsi Sumatera Barat.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pengukuran yang digunakan dalam menilai kualitas *website* Kabupaten Provinsi Sumatera Barat pada penelitian ini menggunakan metode skoring. Analisis skor menunjuk proses menilai alternatif kebijakan dengan menciptakan dan menggunakan indikator-indikator untuk menilai (memberi skor) alternatif-alternatif kebijakan yang telah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, dan bila diperlukan memberikan pembobotan pada indikator yang dinilai lebih penting dari indikator lain (Dwiyanto, 2009). Tahap-tahap penelitian ini adalah:

- Melakukan skoring dari masing masing unit analisis pada *website*.
- Melakukan analisis skoring dari segi konten penilaian fitur, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi.
- Interpretative dari segi user dan perbandingan *website*.

Tabel 2
Penilaian Fitur

No	Unit Analisis	Kategori
1	Selayang Pandang	Sejarah Moto Daerah Lambang Daerah Lokasi Dalam Bentuk Peta Visi dan Misi
2	Pemerintah daerah	Legislatif Eksekutif
3	Geografi	Topografi Demografi Cuaca Iklim
4	Peta Wilayah/Sumber Daya	Batas Administrasi Wilayah Sumber daya/ Potensi Daerah
5	Peraturan/Kebijakan Daerah	Peraturan Daerah Peraturan Walikota
6	Buku tamu dan berita	Berita Layanan Masukan/Pengaduan Masyarakat

Sumber : Kominfo 2017

Tabel diatas merupakan standarisasi unit analisis dalam menilai fitur *website* resmi seluruh Kabupaten di Sumatera Barat dari berbagai referensi yang akan di skoring oleh peneliti pada kertas kerja.

Tabel 3
Penilaian Transparansi

No	Unit Analisis	Kategori
1	Kegiatan Pemerintah	Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJM) Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)
3	Laporan Keuangan Daerah	Neraca/Laporan Posisi Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber : Dwi Martani, 2013

Pada tabel 3, penilaian yang dilakukan adalah melihat suatu *website* yang tranparansi. Suatu *website* dikatakan tranparansi apabila adanya keterbukaan akses masyarakat untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan pemerintah yang disajikan dalam *website*. Kriteria yang ditetapkan dalam penilaian ini adalah adanya keterbukaan informasi mengenai kegiatan pemerintah, keterbukaan informasi mengenai laporan kinerja pemerintah daerah.

Tabel 4
Penilaian Akuntabilitas

No	Unit Analisis	Sumber
1	Menyajikan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	Dwi Martani dkk, 2013
2	Menyajikan Laporan Dana Hibah dan Bansos	Krina, 2003
3	Penyajian Laporan Keuangan tepat waktu	Krina, 2003
4	Adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	Krina, 2003

Pada tabel 4, penilaian yang dilakukan adalah untuk melihat akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah pada *website* pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam organisasi yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury 2003). Dalam melihat akuntabilitas pada *website* yaitu menyajikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), laporan Dana Hibah dan Bansos, penyajian laporan keuangan tepat waktu dan adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Tabel 5
Penilaian Efektifitas

No	Unit Analisis	Kategori
1.	Interactivity	Email
		Telepon
		Alamat <i>website</i>
2	Sistem Navigasi	Fitur Pencarian
		Akun Resmi Media Sosial Pemerintah Daerah
		Statistik Pengunjung

Pada tabel 4, penilaian *website* pemda adalah diukur dari segi efektivitas. Efektifitas pada *website* yaitu apabila suatu *website* tersebut menunjukkan keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari pengertian tersebut ada dua indikator yang menjadi dasar dalam pembuatan *website* pemerintah daerah yaitu *interactivity* dan sistem navigasi yang nantinya dikelompokkan berdasarkan unit analisisnya.

Tabel 6
Penilaian Efisiensi

No	Unit Analisis
1	<i>Website</i> tidak memiliki halaman kosong
2	Informasi penting terdapat langsung pada halaman utama
3	<i>Website</i> tidak memuat halaman perantara

Pada tabel 5, penilaian yang dilakukan adalah mengetahui efisien suatu *website* pemerintah daerah. Suatu *website* dikatakan efisien apabila pemerintah dalam menjalankan *e-government* yaitu adanya penggunaan yang tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Indikator dalam menilai efisien suatu *website* adalah apabila *website* tidak memiliki link kosong (broken link), informasi penting terdapat langsung pada halaman utama, dan *website* tidak memuat halaman perantara.

Dalam melakukan perhitungan penilaian perbandingan, maka akan diberikan skor tertentu dengan mengacu kepada analisis skoring. Jika data ada/tersedia, maka diberi skor 1, jika data tidak ada/ tidak tersedia, maka diberi skor 0.

Tabel 7
Tingkat Penilaian Kualitas *website*

Skor (%)	Penilaian Fitur	Penilaian Transparansi	Penilaian Akuntabilitas	Penilaian Efektif	Penilaian Efisien	Penilaian Keseluruhan
0-25	Tidak lengkap	Tidak transparansi	Tidak akuntabilitas	Tidak efektif	Tidak efisien	Tidak berkualitas
26-50	Kurang lengkap	Kurang transparansi	Kurang akuntabilitas	Kurang efektif	Kurang efisien	Kurang berkualitas
51-75	Cukup lengkap	Cukup transparansi	Cukup akuntabilitas	Cukup efektif	Cukup efisien	Cukup berkualitas
76-100	Lengkap	Transparansi	Akuntabilitas	Efektif	Efisien	Berkualitas

Tabel diatas merupakan standarisasi unit analisis dalam menilai kualitas *website* pada *website* resmi Kabupaten yang ada di Sumatera Barat dari berbagai referensi yang akan di skoring oleh peneliti dalam kertas kerja. Dalam melakukan perhitungan penilaian perbandingan,

maka akan diberikan skor tertentu dengan mengacu kepada analisis skala penilaian sebagai berikut (Dana Sulistiyo dkk, 2008)

Rumus perhitungan bobot skor yaitu sebagai berikut :

$$\text{Bobot skor} = \frac{\text{Jumlah hasil skoring } \textit{website} \textit{ pemda} \times 100\%}{\text{Total skor}}$$

Setelah melakukan tahap skoring, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan hasil analisis pada setiap *website* pemerintah daerah sesuai dengan unit analisis penelitian. Kemudian melihat manfaat *website* untuk pengguna dari fitur-fitur yang disajikan *website* pemda tertentu dan membandingkan *website* pemda kota Sumatera Barat dengan *website* pemda terbaik di Indonesia. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari hasil yang telah didapat untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Penelitian kualitas *website* ini dilakukan dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Dari 12 Kabupaten di Sumatera Barat, hanya 10 Kabupaten yang dapat diteliti karena dua *website* tidak dapat diteliti yaitu *website* Kabupaten Pasaman Barat dan *website* Kabupaten Padang Pariaman. Pada Kabupaten Pasaman Barat tidak dapat diakses dengan tampilan “404 not found”, dan pada saat penelitian Kabupaten Padang Pariaman masih dalam tahap perbaikan.

Dalam penelitian ini menggunakan lima penilaian kualitas *website* yaitu penilaian fitur, penilaian transparansi, penilaian akuntabilitas, penilaian efektifitas dan penilaian efisien yang terdiri dari 40 unit analisis. Berikut hasil dari penilaian kualitas *website* pemerintah daerah pada 10 Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Berikut hasil penelitian kualitas *website* pemerintah daerah dari ke enam *website* pemerintah daerah kota di Sumatera Barat.

Tabel 8
Hasil Persentase Bobot Skor

No	Website Pemda	Fitur	Transparansi	Akuntabilitas	Efektifitas	Efesiensi	Bobot Skor Keseluruhan	Penilaian
1	Kota Padang	30%	2,5%	7,5%	15%	2,5%	60%	Cukup Berkualitas
2	Kota Solok	35%	2,5%	5%	15%	5%	65%	Cukup Berkualitas
3	Kota Sawahlunto	27,5%	0	0	12,5%	2,5%	45%	Kurang Berkualitas
4	Kota Padang Panjang	27,5%	12,5%	7,5%	7,5%	2,5%	57,5%	Cukup Berkualitas
5	Kota Bukittinggi	35%	7,5%	5%	10%	7,5%	65%	Cukup Berkualitas
6	Kota Pariaman	22,5%	7,5%	5%	12,5%	5%	52,5%	Cukup Berkualitas
7	Kota Payakumbuh							

Pada saat ini, Kabupaten di Sumatera Dalam melakukan penilaian kualitas *website* Pemda, menunjukkan belum ada *website* yang berkualitas berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan. Informasi yang paling banyak disajikan oleh Pemda dalam *websitenya* adalah penyajian penilaian fitur. Hampir seluruh *website* menyediakan semua unit kategori dari masing-masing unit analisisnya. Dari penilaian fitur Kabupaten di Sumatera Barat yang paling tinggi diperoleh oleh Kabupaten Dhamasraya yang menyediakan seluruh unit analisisnya.

Sementara disisi lain, penyampaian informasi keuangan pemerintah daerah pada saat ini menjadi suatu keharusan yang wajib untuk dijalankan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk transpaansi dan akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah. Kewajiban dalam penyampaian informasi keuangan pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74 tahun 2016. Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang didasarkan pada PP No. 65 tahun 2010. Peraturan tersebut pada pasal 12 menjelaskan bahwa pemerintah wajib mengelola data keuangan untuk disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Pemerintah daerah wajib untuk memulai terwujudnya penyampaian informasi keuangan. Penyampaian informasi keuangan pada pemerintah daerah ini semata-mata dimunculkan dengan tujuan untuk menciptakan *good governance* di Indonesia. Ulum dan Sofyani (2016:35) menyatakan bahwa penyelenggaraan *good governance* dapat terjadi jika tiga prinsip dasar yang meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas telah terpenuhi.

Pada penilaian efektifitas dan efesiensi masih ada fitur yang tidak disajikan. Untuk kategori email, selama proses penelitian tidak ada satupun *website* Kabupaten yang merespon atas email yang telah dikirimkan. Kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan e-government masih

belum optimal. Ditandai dengan *website* masih bersifat pasif karena tidak ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui *website*. Pada unit analisis efesiensi yaitu fitur pencarian, pada *website* Kabupaten Pasaman dan Solok Selatan tidak disajikan. Hal ini jelas akan mempersulit masyarakat dalam mengakses informasi.

Dapat dikatakan, bahwa kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan e-government dalam bentuk *website* sesuai Inpres No 3 Tahun 2003 dalam penyajian informasi masih berada dalam fase pertama dan fase kedua. Fase pertama merupakan fase penampilan *website* (*web presence*) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat dimana sudah tersedia pada semua *website* Pemda Kabupaten. Kemudian fase kedua merupakan fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam *website* pemerintah.

Namun pada fase dua tidak semua berjalan. Meskipun sebagian besar *website* Kabupaten di Sumatera Barat telah terdapat menu khusus/link bernama TPA (transparansi pengelolaan anggaran) untuk mendownload informasi atau dokumen keuangan dan kinerja tetapi menu khusus dan link tersebut terkadang kosong, tidak memuat secara lengkap, dan tidak dipublikasikan secara konsisten setiap tahunnya (Agustin, 2014). Sedangkan untuk komunikasi email, *website* Pemda Kabupaten di Sumatera Barat masih bersifat pasif, karena telah dilakukan pengiriman email dan tidak ada respon pemerintah dan hanya sebagian saja yang menyediakan forum interaksi dengan masyarakat yang menyebabkan informasi berjalan satu arah tanpa ikut serta masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya pada *website*.

Fase ketiga yaitu tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/ formulir untuk secara online mulai diterapkan., aplikasi pemerintahan yang biasanya bersifat konvensional dengan *hardcopy* mulai di konversi kedalam bentuk *softcopy*. Dari perubahan bentuk *hardcopy* ke dalam *softcopy* ini sudah mulai didapatkan manfaat dari ke-efesiensi biaya, misalkan biasanya selalu menggunakan kertas sekarang menjadi berupa file, sehingga mengurangi biaya pembelian kertas dan tinta (Dedi Rianto, 2007). Namun belum ada *website* pemda Kabupaten di Sumatera Barat yang berada pada tahap ini. Pada fase ke empat semua aplikasi pemerintahan sudah berbasis web, untuk itu dibutuhkan konversi pemrograman yang bukan berbasis web kedalam bentuk web. Misalkan dalam aplikasi electronic procurement, manajemen dokumen berbasis web, formulir elektronik seperti pembayaran retribusi, pajak

properti atau lisensi. Tahap ini pun belum ada pemda Kabupaten di Sumatera Barat yang mengaplikasikannya

Implikasi Perbandingan *website*

website pemerintah daerah kota di Sumatera Barat masih belum berkualitas, dapat dibandingkan dengan *website* pemerintah daerah terbaik di Indonesia, yaitu *website* pemerintah daerah Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan sebuah kota yang sudah maju, begitu pun dengan *website* pemerintah daerahnya yang tidak kalah maju dari seluruh kategori penilaian kualitas *website*. Dari segi tampilan awal saja *website* pemerintah daerah Kota Surabaya saja sudah menarik, membuat masyarakat pengguna pun tertarik untuk mengaksesnya.



Gambar 2

Tampilan Utama *website* Kota Surabaya

Untuk informasi, *website* pemerintah daerah Kota Surabaya telah mengupdate seluruh kebutuhan informasi bagi masyarakat pengguna. Seluruh informasi yang dibutuhkan langsung ada pada *website* resmi pemerintah daerah Kota Surabaya ini <http://www.surabaya.go.id>.

Tabel 9

Hasil Penilaian Fitur Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Kategori	Skor
1	Selayang Pandang	Sejarah	1
		Moto Daerah	1
		Lambang Daerah	1
		Lokasi Dalam Bentuk Peta	0
		Visi & Misi	1
2	Pemerintah daerah	Legislatif	1
		Eksekutif	1
3	Geografi	Topografi	1
		Demografi	1
		Cuaca	1
4	Peta Wilayah Sumber Daya	Batas Administrasi Wilayah	1
		Sumber daya/ Potensi Daerah	1
5	Peraturan/Kebijakan Daerah	Peraturan Daerah	1
		Peraturan Pemerintah	1
6	Buku tamu dan berita	Berita	1
		Layanan Pengaduan Masyarakat	1

(Sumber: data yang telah diolah, 2018)

Penilaian fitur untuk *website* pemda Kota Surabaya dapat dilihat bahwa dari 17 unit

analisis yang dinilai, Pemda Kota Surabaya mampu menyajikan 16 unit analisis dengan penilaian lengkap. Hanya 1 unit analisis lokasi dalam bentuk peta yang tidak tersaji pada *website* pemda Kota Surabaya. Jika dibandingkan dengan *website* Kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaten Dhamasraya lebih baik dengan menyajikan seluruh unit penilaian fitur.

Tabel 10

Hasil Penilaian Transparansi Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Kategori	Skor
1	Kegiatan Pemerintah	Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	1
		Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	1
2	Laporan Kinerja Pemerintah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)	1
		Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1
		Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD)	1
3	Laporan Keuangan	LPK/Neraca	1
		Laporan Realisasi Anggaran	1
		Laporan Arus Kas	1
		Catatan Atas Laporan Keuangan	1
Total Skor			9
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan			22,5%
Persentase Per Penilaian Transparansi			100%
Penilaian			Sudah Transparan

(Sumber: data yang telah diolah, 2018)

Pada penilaian transparansi, *website* pemda Kota Surabaya mampu menyajikan seluruh unit analisis penilaian transparansi. *website* pemda Kota Surabaya dinilai bersifat transparan dengan persentase 100%. Hal ini jauh berbeda dibandingkan *website* Kabupaten Sumatera Barat yang masih minim penyajian informasi keuangan dimana penilaian tertinggi hanya sebesar 44,4% dengan penilaian kurang transparansi.

Tabel 11

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Skor
1	Menyajikan Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	1
2	Menyajikan Laporan Dana Hibah dan Bansos	1
3	Penyajian Laporan Keuangan Tepat Waktu	1
4	Adanya Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	1
Total skor		4
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan		10%
Persentase Per Penilaian Akuntabilitas		100%
Penilaian		Sudah Akuntabel

(Sumber: data yang telah diolah, 2018)

Pada penilaian akuntabilitas, *website* Pemda

Kota Surabaya mampu menyajikan seluruh unit analisis penilaian akuntabilitas yang dinilai. Hal ini masih tertinggal dengan keadaan *website* pemda Kabupaten Sumatera Barat yang masih belum satupun menyajikan laporan keuangan tepat waktu. *website* pemda Kota Surabaya dinilai bersifat akuntabel dengan persentase 100%.

sedangkan pada *website* Kota Surabaya masih ada ditemukan halaman kosong pada saat pengaksesan. Penilaian yang diperoleh yaitu cukup efisien.

Dari hasil penilaian, *website* Pemda Kota Surabaya sudah berkualitas dilihat dari penyajian informasi yang ada. Pada penilaian fitur hanya lokasi dalam bentuk peta yang tidak disajikan. Pada penilaian transparansi dan akuntabilitas seluruh item penilaian tersedia. Pada penilaian efektifitas yang tidak disediakan yaitu alamat *website* dan vote pendapat dan pada efisiensi masih ada halaman kosong pada saat pengaksesan. Jika dibandingkan dengan *website* Kabupaten Sumbar masih jauh tertinggal. Pada *website* Kabupaten Sumbar masih banyak informasi yang tidak disajikan khususnya informasi keuangan, dan informasi yang disajikan tidak *update*.

Pada *website* Kota Surabaya informasi yang disajikan sangat lengkap seperti Surabaya terkini, layanan publik, keamanan, pemerintah, ekonomi bisnis, tentang Surabaya, Surabaya Smartcity dan sosial budaya. Pada *website* Kota Surabaya juga terdapat Sub fitur dari fitur “Things To Do” seperti Event In Surabaya, Event Calendar, Annual Event, Destination, City Tour, Museums, Monuments, Parks And Gardens, Art Galleries, Family Entertainments, Culinary, Public Library, Convention And Exhibition, Shopping, Sports, Spa And Massage, Karaoke And Pub, Heritage Culture, Traditional Art Performances, Historical Sites, Religious Tourism, dan Traditional Dishes. Selain itu *website* pemerintah daerah Kota Surabaya juga memiliki fitur “Traveler Information”, “Awards”, “Transportasi Dalam Kota”, “Media Center Pemerintah Kota Surabaya”, “Informasi Perdagangan”, “Informasi Harga Pokok”, “Learning City”, bahkan sudah menjalankan “Smart City”. *website* pemda Kota Surabaya juga sudah menerapkan sistem Surabaya *Smart Windows* (SWS), yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui *smartphone*. Di Kota Surabaya terlihat jelas bahwa dengan kesejahteraan kotanya yang maju, juga mampu mengimbanginya dengan *website* pemerintah daerahnya yang sangat berkualitas.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sumatera Barat sadar dan mengerti bahwa media online adalah sarana atau media sosialisasi yang sangat efektif dan efisien. Pemerintah seharusnya memperhatikan tujuan dibuatnya *website* adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berita dan informasi tentang daerah tersebut sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Kelengkapan data dan akses yang cepat akan

Tabel 12
Hasil Penilaian Efektivitas Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Kategori	Skor
1	Interactivity	Email	1
		Telepon	1
		Alamat Website	0
2	Sistem Navigasi	Fitur Pencarian	
		Akun Resmi Media Sosial Pemerintah Daerah	1
		Satistik Pengunjung	1
		Vote Pendapat	0
Total skor			4
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan			10%
Persentase per penilaian efektivitas			57,14%
Penilaian			Cukup Efektif

(Sumber: data yang telah diolah, 2018)

Pada penilaian efektivitas, *website* pemda Kota Surabaya tidak menyajikan 2 unit analisis dari 7 unit analisis penilaian efektivitas yaitu alamat *website* dan vote pendapat dengan penilaian cukup efektivitas. Berbeda dengan penilaian sebelumnya dimana *website* Kota Surabaya mampu menyajikan seluruh unit analisis penilaian.

Tabel 13
Hasil Penilaian Efisiensi Kota Surabaya

No	Unit Analisis	Skor
1	Website Tidak Memiliki halaman Kosong	0
2	Informasi Penting Terdapat Langsung Pada Layanan Utama	1
3	Website Tidak Memuat Halaman Perantara	1
Total skor		2
Persentase Penilaian Total Unit Keseluruhan		5%
Persentase per penilaian efisiensi		66,6%
Penilaian		Cukup Efisien

(Sumber: data yang telah diolah, 2018)

Pada penilaian efisiensi, *website* Pemda Kota Surabaya menyajikan 2 dari 3 unit analisis,

membuat pelayanan publik menjadi lebih baik. Dengan *website* yang berkualitas maka akan terciptanya aliran informasi optimal antara pemerintah-masyarakat dan sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang dilakukan terhadap 10 *website* Kabupaten di Sumatera Barat, belum ada *website* yang memperoleh kategori lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Kabupaten di Sumatera Barat masih belum maksimal hingga saat ini. Hal ini terbukti dari penilaian terhadap *e-government website* yang masih berada pada tahapan persiapan dan pematangan. Dapat disimpulkan bahwa dari segi kuantitas perkembangan situs *website* pemerintah daerah memang meningkat, namun dari segi kualitas masih belum terlalu baik, tidak semua situs *website* pemerintah daerah menyediakan fasilitas pelayanan publik yang berstandar, informasi yang tidak update dan lebih banyak pemerintah daerah membuat situs semata mata untuk memenuhi persyaratan tuntutan keterbukaan informasi publik tanpa adanya perubahan manajemen kerja pemerintah yang berbasis pada elektronik, sehingga tujuan dari *website* yang berkualitas berdasarkan prinsip *good governance* transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien belum tercapai..

B. Saran

1. Bagi pemerintah, sebaiknya dilakukan secara rutin evaluasi terhadap *website* dan memberikan sanksi terhadap *website* Pemerintah Daerah yang tidak transparan, akuntabel, efektif dan efisien agar pemanfaatan *website* sesuai dengan tujuannya tercapai dengan memperhatikan standarisasi infrastuktur.
2. Dengan biaya yang besar pada pengembangan *website*, seharusnya pemerintah rutin mengadakan pelatihan dibidang teknologi informasi dan komunikasi secara rutin bagi staff yang mengelola situs *website*
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan *website* agar masyarakat melek teknologi dan *website* pun dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada *Website* Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
- Afriyanti, Dwi. 2015. Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Andriariza, Yan. 2014. Analisis Penerapan *e-government* Di Kabupaten Sragen Analysis Of Application Of *e-government* In The District. Jakarta Pusat:Vol 3 No 1.
- Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan. Diambil dari <http://ovy19.wordpress.com>. diakses (2 Februari 2018).
- Aswel, Sata putra. 2013. Konsep dan Jenis *website* Serta Kriteria *website* Yang Baik. Diambil dari <http://sataaswelputra.blogspot.co.id> . Diakses (3 Maret 2018)
- Auditya, Lucy. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Bengkulu:Volume 3 Nomor 1
- Connely, et al. 2011. Signaling Theory A Review and Assessment.
- Cordella, Antonio, dan Tempini, Niccolo. 2015. *e-government* and Organizing nal Change: reporting the role of ICT ang Bureaucracy in Public Service Delivery. Uk: Government Information Quartely.
- Dewi, DPKR. 2015. Agency Theory. Unud. Diambil dari eropo.unud.ac.id. Diakses tanggal (5 Januari 2018).
- Dwiyanto, Agus. 2006. Transparansi Pelayanan Publik. Yogyakarta.
- Efferin, Sujoko. 2012. Metode Penelitian Akuntansi. Yogyakarta.
- Hakiki, Erisva. 2017. E-goverment dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah. Riau.
- Hardono, Wisnu. 2015. Analisis Kualitas dan efektifitas *e-government* Sebagai Media Pelayanan Publik Di Pemerintahan Dearha Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta.
- Heryana, Toni. 2013. Pengaruh Penerapan *e-government* Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan. Cianjur.
- Indiahono, Dwiyanto 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta.

- Indrajit, Ricahrdus Eko. 2006. *Electronic Government*. Yogyakarta.
- Istiqomah. 2013. *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Peerintah Daerah Melalui Internet*. Jawa Tengah.
- Jarot, Dimas Bayu. *Ini Penyebab Penerapan "e-government" di Indonesia Belum Maksimal*. Diambil dari : <http://nasional.kompas.com> (25 Januari 2018)
- Jauhari, Arif, Hasan Basri, M. Shabri. 2015. *Penerapan Good Governance Berbasis E-Goverment dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh*. Banda Aceh:ISSN 2302-0164.
- Khudri, Yusuf, Dwi Martani, Teguh I Maulana. 2013. *Analisis Kualitas Desain dan Kunjungan Situs Pemerintah Derah Di Indonesia*. Bandung.
- Kidi. *Penerapan e-government Untuk Perbaikan Pelayanan Publik Di Sektor Birokrasi*.
- Krishna, Putu, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya. 2015. *Peranan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik*. Klungkung.
- Martani, Dwi, Debby Fitriasari, Annisa. 2013. *Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Bandung.
- Martha, W. 2014. *Transparansi dan Akuntabilitas*. Diambil Dari : <https://repository.widyatama.ac.id>. (5 januari 2018).
- Nurina, Santy, Andy Fefta, Suryadi. 2014. *Efektifitas Website Sebagai Media E Government Dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah*. Jombang.
- Panopoulou et al. 2008. *A framework for evaluating web sites of public authorities*. Yunani.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 2017.
- Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000.
- Putra, Rediyanto, Oryza Ardhiarisca, Rahma Rina Wijayanti, Berlina Yudha Pratiwi. 2018. *Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Rahmanurrasjid, Amin. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawabanPemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Tesis Tidak. Semarang.
- Republik Indonesia (2003). *Instruksi Presiden. Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-government*
- Ridwan, Moehamad. 2014. *Implementasi e-government Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern*. Jakarta.
- Sikumbang, Aidil. 2017. *Sejumlah Kabupaten Di Sumbar Butuh Infrastruktur Telekomunikasi*. Diambil dari Padangkita.com. Diakses tanggal (2 Januari 2018).
- Sitokdana. 2015. *Evaluasi Implementasi e-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura*. Yogyakarta
- Sjahrudin. 2011. *Penerapan good governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Padang.
- Sofia, Alfira, Bagus Husen. 2013. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Pada Website*. Bandung.
- Sulistiyo, Dana, Herlan Puspa, Yanuar Firdaus. 2008. *Analisis Kajian Standarisasi Isi Situs web Pemerintah Derah Kabupaten/Kota*. Yogyakarta
- Teori *website*. 2012. Diambil Dari: E-journal.uajy.ac.id. (5 Januari 2018).
- Undang Undang No 14 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Wau, Ikhlas. 2015. *Teori Signalling Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Keteraksesan Internet Financial Reporting Oleh Pemerintah Daerah*. Semarang.
- Wirartha, I made. 2016. *Metodelogi Penelitisn Sosial Ekonomi*. Yogyakarta.
- Wiratmo, Liliek Budiastuti, dkk. 2017. *website Pemerintah Sebagai Sarana Online Public Relations*. Semarang:Aspikom
- Yohana, Nova, Tantri Puspita, Welly Wirman. 2013. *Pengelolaan Website Sebagai E-Government Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menyampaikan Informasi Bagi Masyarakat*. Riau
- Yoserizal, dkk. 2010. *Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Padang.

- Yoserizal, Wahyu Eko. 2010. *Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Padang.
- Yuhfizal. 2010. Tinjauan Penerapan *e-government* di Provinsi Sumatera Barat. Padang. *Akrual Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang*". Jurnal Akuntansi FEB UNIBRAW, 12.
- Wikipedia, 2018. *Daftar Jumlah Kabupaten dan Kota Sumatera Barat*. Diambil dari <http://www.wikipedia.org>

